

**DARI PAKU SAMPAI SUREMANA:
SEJARAH BATAS SELATAN DAN UTARA MANDAR**
*(FROM PAKU TO SUREMANA: A HISTORY OF THE NORTHERN AND
SOUTHERN BORDERS OF MANDAR)*

Abd. Rahman Hamid

Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia
e-mail: abdul_pasca@yahoo.com

ABSTRACT

The article describes the history of boundaries of Mandar area since the kingdom and colonial, using history research method. The main material used is local and colonial sources (Lontar of Mandar) in particularly the official gazette. The results show that the political foundation of Mandar originated from a confederation of fourteen kingdoms on the coastal and inland at the end of the 16th century or the beginning of the 17th century, which was used by Dutch East Indies government in structuring of Mandar area. When the formation of Mandar's southern boundary is related to other political power of Gowa and Bone particularly, then the northern boundary is carried out by conquering of Kaili. Southern boundary to the Paku River (the Bugis area) and the northern border to the Suremana River (the Kaili area). The boundaries are also used by West Sulawesi Province (formed in 2004), thus, it can be concluded that the province is a new name for Mandar.

Keywords: Mandar history, area border, Paku river, and Suremana river.

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang sejarah batas wilayah Mandar sejak masa kerajaan dan kolonial, menggunakan metode penelitian sejarah. Bahan utama yang digunakan ialah sumber lokal (lontar Mandar) dan sumber kolonial khususnya lembaran negara. Hasil penelitian menemukan bahwa fondasi politik Mandar bermula dari konfederasi empat belas kerajaan-kerajaan di pesisir dan pedalaman akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam penataan wilayah Mandar. Apabila pembentukan batas selatan Mandar terkait dengan kekuatan politik lain terutama Gowa dan Bone, maka batas utaranya dilakukan sendiri dengan menaklukkan Kaili. Batas selatan sampai Sungai Paku (dengan daerah Bugis) dan batas utara hingga Sungai Suremana (dengan daerah Kaili). Batas-batas itu juga digunakan oleh Provinsi Sulawesi Barat (terbentuk tahun 2004), sehingga dapat disimpulkan bahwa provinsi itu adalah nama baru dari Mandar.

Kata kunci: Sejarah Mandar, Batas Wilayah, Sungai Paku, dan Sungai Suremana

PENDAHULUAN

*“Mammula mellamba dini di Paku lambi’
naung di Suremana, sangnging ma’ua pirandi
anna’ pole* (Berjalan dari Paku sampai
Suremana, hampir semua mengatakan kapan
datang)” demikian satu petikan syair lagu
Mandar, *Pasurungai Salili* (Sebab Kerinduan),
karya cipta Andi Syaiful Sinrang yang
dipopulerkan oleh Mety Baan tahun 1980-an.
Syair tersebut mengingatkan mengenai batas
wilayah Mandar bagian selatan yakni Sungai
Paku dan batas utara adalah Sungai
Suremana. Dengan demikian, bila lagu itu

dinyanyikan maka masyarakat akan mengingat
batas wilayah Mandar.

Penjelasan sejarah batas wilayah
Mandar sangat penting karena itu menjadi
landas wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang
dibentuk tahun 2004. Wilayah tersebut sering
merujuk wilayah Mandar pada masa Hindia
Belanda, ketika terbentuk *Afdeling* Mandar
pada tahun 1909. Tetapi, tidak berarti bahwa
Mandar secara politik baru terbentuk pada
tahun tersebut. Sebab Mandar sesungguhnya
adalah kesatuan politik (konfederasi), antara
daerah pesisir dan daerah pedalaman, yang

saling menguatkan (*sipamandar*). Kehadiran Belanda tidak menghapus semua jejak kerajaan-kerajaan di Mandar. Kendati tidak dipungkiri bahwa penataan administratif Mandar masa kolonial lebih jelas dibandingkan masa kerajaan.

Artikel ini menjelaskan mengenai pembentukan Mandar dan dinamika batas wilayahnya. Ada tiga pertanyaan yang coba dijawab: *pertama*, faktor-faktor yang mendorong terbentuknya konfederasi Mandar? *kedua*, bagaimana pola perluasan wilayah kekuasaan Mandar di selatan dan utara? dan *ketiga*, apa yang diwariskan oleh Mandar terhadap penataan wilayah Provinsi Sulawesi Barat?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Bahan yang digunakan terutama sumber lokal dan kolonial. Sumber yang pertama diperoleh dari Museum Mandar di Kabupaten Majene berupa lontara Mandar. Tiga lontar yang telah ditranskrip dan terjemahkan adalah: *Lontarak Pattodioloang* I dan II oleh M.T. Azis Syah (1992, 1993), *Lontara Pattappingan* dari Pambauwang oleh Suradi Yasil ddk (1985), dan *Lontar Mandar* oleh Disporabudpar Majene (2010). Problematika sumber tersebut terkait waktu peristiwa yang tidak disebutkan secara eksplisit. Karena itu harus dicari dalam sumber lain, dalam hal ini terutama memori serah terima jabatan Asisten Residen Mandar W.J. Leyds (1935-1940). Sumber kedua diakses dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan (DPK Sulsel) di Makassar berupa Staatsblad van Nederlands Indie (Lembaran Negara Hindia Belanda). Dibandingkan sumber yang pertama, sumber kedua lebih jelas waktunya, sehingga mudah menyusun kronologi peristiwa. Bahan-bahan tersebut dipilih dan dianalisa sesuai fokus kajian, kemudian dirangkai menjadi satu kisah sejarah. Pada tahap yang terakhir diperlukan konsep tertentu untuk mengikat antara fakta yang tidak terhubung menjadi saling terkait (baca Ankersmit, 1987: 222-232). Konsep yang dimaksud adalah batas wilayah (*boundaries*). Semua fakta yang ditemukan dalam sumber

sejarah digunakan sejauh itu mendukung penjelasan mengenai batas wilayah Mandar.

PEMBAHASAN

Terbentuknya Mandar

Dalam sumber-sumber lokal disebutkan bahwa terbentuknya konfederasi Mandar atas prakarsa dari raja Balanipa ke-2, Tomepayung (1580-1610), dibantu oleh adiknya, Todijallo, sebagai *maradia matoa* (perdana menteri), dan I Puang di Pajosong. Tokoh yang terakhir bersama seribu pengikutnya pindah ke pantai, kemudian Maradia I Boro-boro dan pengikutnya (Syah 1992: 41-42). Pada masa itu, Kerajaan Balanipa mengembangkan perdagangan maritim. Dua pelabuhan utama kerajaan itu, Para dan Baba'rura, berada pada sebelah-menyebelah dari muara Sungai Balanipa (sekarang Sungai Mandar). Walhasil, kehidupan penduduk makmur (Syah 1993: 44).

Tomepayung menyadari bahwa kemajuan perdagangan harus ditunjang dengan penyatuan kerajaan-kerajaan di pesisir dan pedalaman. Dari pedalaman diperoleh hasil-hasil bumi yang dibawa ke pelabuhan-pelabuhan pesisir, kemudian diangkut atau diperdagangkan ke luar daerah. Guna mencapai itu, langkah *pertama* ialah mengadakan pertemuan di Bukit Tamanjarra Balanipa yang dihadiri tujuh raja pesisir: Tomepayung (Balanipa), Puatta di Kuqbur (Sendana), Daetta Melantoq (Banggae), Tomelakelake Bulawang (Pamboang), Puatta Dikarenamo (Tapalang), Tomejammeng (Mamuju), dan cucu Tokombong Dibura (Binuang). Pertemuan dua kali di tempat itu menghasilkan dua kesepakatan (*asitalliang*) Tamanjarra I dan II. Dalam satu diktum disebutkan "*urupau pura loa, limbang nyawa tallallaq pura pau*" (pantang melepaskan perjanjian kesepakatan, jiwa boleh melayang tetapi perjanjian pantang diingkari) (Sjarifuddin 1989: 281-282). Selanjutnya diperkuat dengan kalimat sanksi, bahwa "siapa saja yang melanggar ikrar bersama yang telah kita ucapkan, [ibarat] bumbungan dan tiang rumah dibalikkan ke bawah" (Disporabudpar 2010: 112). Disepakati juga Balanipa sebagai ketua (ayah), Sendana adalah wakil (ibu), dan yang lain sebagai anggota (anak). Sejak saat itu, kerajaan-kerajaan pesisir menjadi satu kesatuan,

Pitu Babana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara), selanjutnya disebut Mandar Pesisir.

Sementara itu, di daerah pedalaman terbentuk satu persekutuan. Diawali dengan pertemuan tujuh kerajaan: Tabulahan, Rantebulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Dalam pertemuan disepakati Tabulahan bertindak sebagai *indo litaq* (ibu negeri) dan yang lain menjalankan fungsi masing-masing dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan (Amir dan Sahajuddin 2011: 98-103; Poelinggomang 2012: 51-55). Ditilik secara geografis, tujuh kerajaan tersebut berada di daerah pedalaman, sekitar hulu Sungai Sa'dang. Karena itu, persekutuan mereka disebut *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Kerajaan di Hulu), dalam tulisan ini disebut Mandar Pedalaman.

Langkah yang *kedua*, Tomepayung memprakarsai penyatuan antara Mandar Pesisir dan Mandar Pedalaman. Pemimpin dari kedua belah pihak bertemu di Luyo Balanipa. Pihak pertama diwakili oleh Raja Balanipa Tomepayung, sedangkan pihak yang kedua oleh Raja Rantebulahan, Londong Dahata. Kedua pihak sepakat dan berjanji saling menguatkan (*sipamandar*). Kalau dalam perjanjian Tamanjara menggunakan kata *assitaliang*, dalam perjanjian ini lebih tegas lagi dengan ungkapan menanam batu (*allamung batu*). Setiap pihak bertanggungjawab menjaga keselamatan negeri dari segala ancaman baik dari laut maupun pegunungan (pedalaman), sebagaimana terpatri dalam kalimat berikut:

*Ulu Sallu mematta di sawa
Baqba Binanga mematta di pearappe anna
mangiwang
Sisaraq pai mata malotong anna mapute,
anna sisaraq Pitu Ulunna Salu Pitu
Baqbana Binanga (Mandra 1987: 95-96).*

Apabila dilihat pihak pemrakarsa persekutuan, yakni pimpinan Mandar Pesisir, tampak jelas kepentingan untuk mengamankan negeri dan penduduk terhadap ancaman dari laut. Sebab, penduduk pesisir telah berinteraksi dengan “dunia” yang lebih luas di luar sana. Interaksi itu tidak hanya memberikan peluang memperoleh keuntungan dari segi ekonomi,

tetapi juga ancaman (keamanan) bagi masa depan Mandar yang bisa datang sewaktu-waktu seiring kemajuan perdagangan maritim.

Guna memajukan perdagangan maritim, Raja Balanipa ke-4, Daetta Kakanna Ipatang (mulai memerintah 1615) memindahkan seribu penduduk ke pantai yang diikuti oleh *papuanan koyang*. Karena kegiatan penduduk semakin ramai, maka diadakan struktur baru dalam pemerintahan, yakni *sawannar* (syah-bandar), yang diemban oleh kaum adat, bertugas mengurus kegiatan pelayaran dan pelabuhan. Pada masa itu datang penyiar Islam dari Mekkah, Tosalama' di Benuang, menumpang sebuah perahu bernama (bukan jenis) *Baggo*. Dia mengislamkan Daetta I Pattang bersama dengan rakyatnya di Balanipa, Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-todang (Yasil dkk 1985: 50; Disporabudpar 2010: 118). Pada sumber lain disebutkan bahwa masa pengislaman di Mandar terjadi pada 1610-1620 (Leyds 2006: 25).

Puncak kemakmuran Mandar dicapai pada masa pemerintahan Raja Balanipa ke-6, Todiboseang (1620-1632). Dalam *Lontar Mandar* (Disporabudpar 2010), disebut bahwa raja memiliki satu perahu khusus, bernama *I Tandijo'jo*, yang mempunyai empat tempat berlabuh. Sumber lain, *Lontar Pattudioloang* (Syah 1992) menyebutkan dia punya empat perahu, masing-masing dilengkapi dengan dua tiang layar (*dua battajanna lopinna*) dan dicat indah. Dalam lontar *Pattappingang* (Yasil dkk 1985) dikemukakan bahwa perahu raja, *I Tandijo'joq*, mempunyai dua tempat landasan, dan empat perahulain sedang berlabuh. Keterangan tersebut memiliki kesamaan, bahwa raja memiliki satu perahu khusus, *I Tandijo'joq*, didampingi empat perahu lain.

Lima perahu tersebut cukup besar sehingga diperlukan penduduk satu kampung untuk mengambil penambal (*baruq*) perahu. Lima perahu itu, biasanya membawa delapan puluh pasukan penebas, seribu penyumpit, dan delapan puluh pasukan penyerang, digunakan oleh raja pada setiap ekspedisi. Istana dibangun tujuh petak yang diberi tambahan pada sisinya, tiga panggung kehormatan di depan. Pandai emas di bagian samping kanan dan kiri bagian depan istana. Sedangkan pelarut dan penempa

logam, pelukis, dan pengukir kayu di belakang istana. Pada masa ini wilayah Mandar diperluas sampai di daerah Kaili (Yasil dkk 1985: 222; Syah 1993: 67-69).

Batas Selatan

Batas paling selatan wilayah Mandar ialah Binuang. Ia sering diperebutkan antara Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Batulappa. Sebelum menjadi anggota Mandar Pesisir, Binuang dibawah kekuasaan Batulappa. Pada satu waktu, pedagang datang dan singgah di sana. Ia melihat penduduk Binuang ke Batulappa mengantar upeti. Ketika tiba di Makassar, pedagang itu menyampaikan kepada raja Gowa bahwa sungguh raja Batulappa sangat kaya. Raja Gowa kemudian memanggil raja Batulappa ke istana, dan menyampaikan bahwa “*beiya batuammu naualli disanga to Benuang*” (berikanlah saya hambamu yang disebut Benuang), agar tidak menjadi masalah dengan Sawitto. Sebab, Sawitto merupakan sekutu Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu. Raja Batulappa tidak menolak, namun Gowa tidak mau mengambilnya begitu saja. Binuang dibeli oleh Gowa (Syah 1992: 16-17). Menurut Stephen C. Druce (2009: 131-132), peristiwa tersebut terjadi sebelum masa Islam, terkait upaya raja Gowa memajukan perdagangan maritim di pelabuhannya. Hingga abad ke-15, daerah itu merupakan salah satu tempat berlabuh para pedagang, seperti terungkap pada kisah di atas.

Pada tahun 1607 dan 1611, pasukan Mandar Pesisir membantu Kerajaan Gowa menyerang Bone. Dua serangan itu berhasil. Atas usaha itu, raja Gowa berhutang budi kepada Mandar, dan hendak memberikan hadiah kepadanya. Dalam sumber lokal disebutkan:

“saya tidak tahu betapa besar nilai jasa *mara'dia* Balanipa. Ia kuberi emas, ada emasnya, dia kuberi harta benda ada hartanya, hanya saja satu, bahwa ada negeri bernama Benuang, saya pernah beli dari *mara'dia* di Batulappa, saya takarkan emas untuk membayarkan harga orang Benuang itu dari *mara'dia* Batulappa. Kau jadikan sirih, kau jadi-

kan pinang terserah. Mereka itu keluargamu juga, tetanggamu juga itulah yang kuserahkan kepadamu. Kau jadikan hamba, kau jadikan teman terserah. Berkata *mara'dia* Sendana: baik kita jadikan penambah diri sehingga kita menjadi tujuh [...] Negerinya dijadikan negeri orang Mandar, hasil buminya dijadikan hasil negeri Mandar dari **Binanga Karaeng sampai ke Madatte** [tebal dari penulis]” (Syah 1992: 47-48).

Binuang menjadi bagian Mandar Pesisir, sebagai anggota terakhir (ketujuh). Dalam catatan Leyds (2006: 27), Gowa menghadiahkan Binuang kepada Tomepayung karena membantunya mengalahkan Bone. Pada sumber lain, disebut bahwa Binuang adalah hadiah dari Bugis (Yasil dkk 1985: 279). Dalam konteks terakhir, Binuang dipandang sebagai daerah yang dikuasai Kerajaan Batulappa (Bugis), atas permintaan Gowa, kemudian diserahkan kepada Mandar.

Setelah Binuang lepas dari kuasa Gowa, timbul konflik batas antara Kerajaan Sawitto (Ajattaparang) dengan Kerajaan Balanipa pada masa pemerintahan Todiboseang (1620-1632). Pihak yang pertama menyampaikan bahwa batas wilayah Mandar sampai Gamoe (daerah Kolonisasi, sekarang Wonomuyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), namun Balanipa mengatakan batasnya hingga Maroneng (sekarang Desa Maroneng Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan). Seluruh kerajaan Mandar Pesisir di Gamoe, bersiap menyerang Sawitto. Melihat akan terjadi perang, raja Batulappak menemui raja Gowa. Lalu datang raja Gowa menengahi permasalahan. Dengan disaksikan raja Batulappak, raja Gowa menetapkan sebelah luar sungai Galang Kalang (Galang-galang) adalah negeri orang Mandar, sedangkan di sini (sebelum aliran sungai) adalah negeri Sawitto. Raja Gowa berkata lagi, “*nauwalai di' o Binangao*” (saya mau ambil sungai itu). Itulah sebabnya, sungai itu disebut Binanga Karaeng atau Sungai milik Karaeng (Syah 1992: 66-67).

Bantuan Mandar Pesisir kepada Gowa juga pada Perang Makassar (1666-1669). Komandan pasukan Kompeni (Verenigde Oost-indische Compagnie; VOC), Cornelis Janson Speelman, menyadari pasukan Mandar adalah “di antara yang paling ditakuti dalam kekuatan Makassar, mempunyai banyak senjata, pencari jejak yang hebat dan ahli sumpit beracun” (Andaya 2004: 96-97). Keberadaan mereka menarik perhatian Arung Palakka. Ketika perahu raja Balanipa, Tomatindo di Buttu, tiba di pantai Makassar, Arung Palakka datang dengan sebuah sampan kecil dengan tujuan mengajak bersekutu. Pada awalnya, raja Balanipa setuju. Namun setelah datang raja-raja Mandar Pesisir yang lain, yang tidak mau bersekutu dengan Arung Palakka, raja Balanipa membatalkannya. Mereka berperang melawan Arung Palakka dan sekutunya. Dalam perang itu, raja Balanipa tertembak mati di pantai Galesong, sehingga dikenal To Niposso di Galesong. Jenazahnya dibawa pulang dan dimakamkan pada sebuah gunung di Mandar (Disporabudpar 2010: 126-137; Syah 1993: 74-77).

Kematian raja Balanipa tidak menyurutkan dukungan Mandar kepada Gowa. Enampuluh perahu Mandar, dengan seribu pasukan, dipimpin Mangga Daeng Riosok menyerang Buton di pesisir timur. Mereka membantu pasukan Karaeng Bontomarannu menduduki Buton pada akhir Desember 1666. Pada 1 Januari 1667, mereka menghadapi pasukan Buton dan Speelman yang baru datang dari Makassar. Tanggal 4 Januari, panglima pasukan Gowa menyerah. Semua perahu dan pasukan Mandar ditahan di sebuah pulau kecil di depan Buton. Pada malam hari, Daeng Riosok dan beberapa pengikutnya meninggalkan pulau itu dengan dua perahu. Sekitar 800 pasukan Mandar ditawan, 400 di antaranya dijadikan budak dan yang lain ditinggalkan di pulau itu bersama tawanan Makassar. Total tawanan ditaksir 4.500. Cornelis Speelman menyebut pulau itu *over winner eiland* (pulau sang pemenang), atau juga *Makassarche Kerkhof* (pekuburan orang Makassar). Nama terakhir lebih populer, dengan sedikit penyesuaian, menjadi Pulau Makassar atau Puma (Patunru 1983: 47; Zuhdi 2018: 145).

Pasca perang Makassar, ketika Belanda memaksa sekutu Gowa menandatangani Perjanjian Bungayya 1667, raja-raja Mandar tidak langsung menerima. Mereka bahkan tidak mendukung Arung Palakka dan sekutunya. Mandar menjadi tempat pelarian bagi para bangsawan Makassar seperti Karaeng Bontomarannu, Opu Canning, dan Karaeng Karunrung serta orang Melayu yang meninggalkan Makassar. Sekitar seribu pelaut Mandar melindungi Karaeng Bontomarannu, ketika panglima perang Gowa itu muncul di Ujung Lero pada tahun 1669 (Andaya 2004: 263).

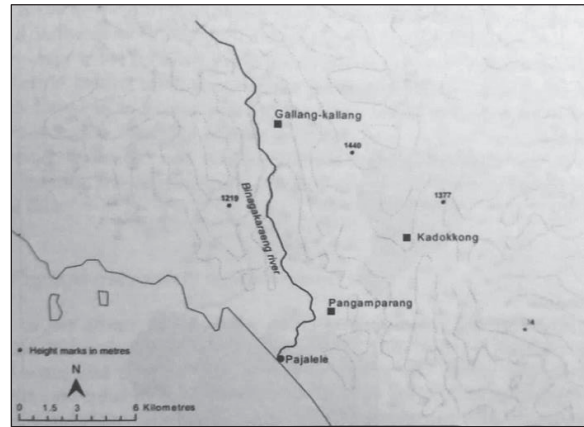
Kendati demikian, Arung Palakka tetap berupaya mendapatkan Mandar sebagai sekutu, seperti saat sebelum perang Makassar. Pada tahun 1669, utusan Bone dan beberapa orang Eropa ke Mandar runtuk mengajak raja-rajanya bersekutu, tetapi tidak diterima. Bahkan, pada musim timur, ketika para utusan tiba di Mandar, penduduk meninggalkan pesisir ke pedalaman (Leyds 2006: 31). Setelah ancaman berlalu, mereka kembali ke pesisir. Ancaman musiman itu terpatri dalam ingatan kolektif Mandar dalam sumber lokal, “pada musim Barat peperangan dihentikan, di musim Timur peperangan dilanjutkan (*bara’ me’oasa bomi mammusu timori*)” (Disporabudpar 2010: 23, 129).

Pada musim timur berikutnya, tepatnya 6 Oktober 1671, pasukan gabungan Belanda dan Bone ke Mandar. Pada saat itu, pasukan Mandar dipimpin oleh Manggak Daeng Rioso (Maradia Malolo) dan To Matindo di Sallombo (Maradia Banggae). Mandar diserang dari laut. Daerah Kande Api (sekarang Soreang) dibakar. Seluruh pemukiman dan perkebunan di Balanipa, Majene, Bukko, Campalagian, dan Binu-ang dibakar. Penduduk menyelamatkan diri ke pedalaman, Napo (Andaya 2004: 177). Pasukan Mandar bertahan, lalu menyerang balik. Pasukan Bone dipukul mundur sampai ke perahu mereka. Kali ini, Maradia Banggae terbunuh di daerah Mallaju (Malaujang) (Disporabudpar 2010: 130-133). Daeng Rioso memimpin pasukan Mandar menyerang Bone. Arung Palakka hampir terbunuh. Ia menyelamatkan diri dengan berenang ke tengah laut. Karena terdesak, Arung Palakka menyuruh orang Gowa mengibarkan bendera Gowa, *Cinde Sulengkana Gowa* dan bendera Tallo, *Macakkek*

Borik Tallok. Melihat bendera itu, pasukan Mandar berhenti menyerang. Lalu Arung Palakka dan pasukannya meninggalkan Mandar, tiba di Makassar pada 16 November 1671 (Yasil dkk 1985: 229, 290).

Pada tahun 1673, perahu-perahu Bone datang lagi. Mereka mendesak penduduk Mandar ke pedalaman. Dua kampung, Napo dan Samasudu, dibakar. Selama lima puluh hari mereka di Mandar, lalu kembali ke Makassar (Disporabudpar 2010: 129-132). Pada bulan September 1674, mereka datang lagi menemui raja Balanipa, Daeng Riosok, di Lanrisang. Saat itu kedua belah pihak sepakat menghentikan perang. Pada 23 September, mereka berjanji saling percaya, bahwa “perkataan Bone dipercaya Mandar, perkataan Mandar dipercaya Bone” (Syah 1993: 84). Tanggal 10 Oktober, raja-raja Mandar tiba di Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam). Esok hari, 11 Oktober, mereka bersumpah di atas al-Quran menerima Perjanjian Bungayya 1667 (Block 1817: 79-80). Pada pertemuan itu juga ditentukan, bahwa Binanga Karaeng, Kadokang, dan Kadang-Kadang dikembalikan kepada Sawitto (Leyds 2006: 31-32; lihat juga *peta 1*).

Dengan demikian, dari hasil pertemuan di atas, batas wilayah Mandar di selatan sampai Sungai Paku. Bagian timur Sungai Paku menjadi wilayah Sawitto, sedangkan bagian barat adalah Binuang. Wilayah Sawitto yang berbatasan dengan Sungai Paku disebut *Pajalele*, dari bahasa Bugis: *paja* (tidak) dan *lele* (pindah), atau tidak pindah lagi. Sedangkan untuk wilayah Binuang, nama daerahnya disebut *Paku* atau tidak bergerak (Wawancara dengan Syarifuddin Letu dan Budiati Bestari, 7 Juni 2018). Pada prinsipnya, arti dari kedua nama tempat di antara aliran sungai itu mempunyai makna yang sama, yakni batas tetap (tidak berpindah) antara Binuang (Mandar) dan Sawitto (Bugis).



Peta 1. Sungai Binanga Karaeng (*sumber: Stephen C. Druce 2009: 133*).



Gambar 1. Muara Sungai Paku[dahulu Binanga Karaeng] (*Dok. Abd. Rahman Hamid, 2018*)

Meskipun raja-raja Mandar mengakui kekuasaan Belanda tahun 1674, namun status negerinya tidak selalu dibawah pengaruh Belanda. Satu tahun setelah perjanjian Bungayya diperbaharui 1824, baru raja-raja Mandar menandatangani, tepatnya 1825. (ANRI Algsec No.3188). Sampai tahun 1848, Belanda belum mendirikan pemerintahan di Mandar, bahkan tidak mengetahui dengan baik keadaannya (ANRI 1973: cvii-cviii, 297-298). Bahkan, pada tahun 1872-1873, rakyat Mandar dibawah dipimpin Maradia Tokape melawan Belanda. Dampaknya, pelaut dan pedagang Mandar kurang mengunjung Makassar sehingga, di samping pemberontakan Bone, perdagangan Makassar merosot dalam periode 1870-1875 (Poelinggomang 2016: 162-166).

Kerajaan Binuang adalah salah satu dari empat kerajaan merdeka di Mandar (Balanipa,

Banggae, dan Pambauwang). Hubungannya dengan Belanda diatur sesuai Perjanjian Bungayya diperbaharui 1824. Ketika kasus perdagangan budak di Binuang tahun 1888 dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi di Makassar, pelakunya tidak dapat dihukum karena “ia melakukan perbuatan itu di luar wilayah Hindia Belanda”. Pelaku dipandang sebagai orang asing atau *uitlandig*. Kasus Binuang menambah satu fakta, bahwa Indonesia tidak benar dijajah 350 tahun, sehingga sebagian kalangan memandang itu sebagai mitos politik belaka (baca Resink 2012: 74-75, 119).

Belanda tidak lekas menyerah untuk menguasai Mandar. Pada tahun 1905, setelah mengirim tiga kapal perang ke Mandar (Juni 1905), Belanda memaksa raja-raja Mandar menandatangani kontrak politik: Balanipa (12 Agustus), kemudian Majene (13 Agustus), Pambauwang (14 Agustus), Binuang (21 Agustus), Mamuju (5 Oktober), Cenrana (6 Oktober), dan Tappalang (8 Desember). Substansi semua kontrak sama, yakni kewajiban menyeter pajak pelabuhan kepada Belanda di Majene. Hal itu menyebabkan I Calo Amanna I Wewang, dengan 150 pasukan, merebut kota pelabuhan Majene 6-7 Juni 1906. Seorang pegawai kontrolir, Schmidamer, dibawa ke pedalaman lalu dibunuh. Sementara kontrolir, Ketting Olivier, melarikan diri ke Parepare dengan sebuah perahu kecil. Asisten Residen Vermeulen meminta bantuan dari Makassar. Pada 13 Juni, sebuah kapal membawa 60 pasukan dipimpin Kapten Lenshoek menyerang Mandar. Amanna I Wewang ditangkap, lalu disingkan ke Pulau Belitung (Kolonial Verslag 1907, 65-66). Semua wilayah Mandar dikuasai Belanda. Pada tahun 1909, Mandar ditetapkan sebagai satu *afdeling* dalam Provinsi Sulawesi dan Daerah Bawahannya, terdiri atas dua *onderafdeling*: Majene dan Mamuju. Khusus Binuang termasuk *onderafdeling* Majene.

Batas Utara

Apabila perluasan wilayah selatan dicapai pada masa Tomepayung (1580-1610) dan daerah yang ditambahkan (Binuang) sebagai “hadiah” atas jasa Mandar membantu Gowa menyerang Bone, maka perluasan wilayah ke

utara dilakukan pada masa Todiboseang (1620-1632) dengan jalan penaklukan secara langsung. Dalam *Lontar Pattodioloang I* disebutkan bahwa dia adalah raja yang tegas dan disegani, yang membuat harum nama Balanipa. Dikawal oleh delapan puluh orang, delapan puluh pasukan berani mati, dan seribu penyempit (Syah 1992: 65).

Setelah batas selatan ditetapkan, raja Todiboseang memimpin pasukan Mandar Pesisir menyerang Kaili (Donggala). Awalnya, pasukan Mandar tidak yakin mampu mengalahkan pasukan Kaili. Lalu datang bantuan Maradia Bangge, Tomatindo di Barokbok, dan pasukan Kaili berhasil dikalahkan. Sebagian orang Mandar ditempatkan di Kaili. Raja Balanipa sakit dan meninggal di sana. Jenazahnya dibawa dengan perahu ke Mandar. Karena itu, dia dikenal dengan *Todiboseang* (orang yang didayungkan). Sementara itu, Puang Limboro, yang menikah dengan seorang perempuan Kaili, pulang membawa isterinya ke Mandar (Syah 1992: 67-69).

Bila penyerangan pertama dilandasi usaha perluasan kekuasaan, penyerangan kedua bertujuan mempertahankan wilayah Mandar di utara, dengan sasaran yang sama, yakni Kaili. Peristiwa kedua termaktub dalam *Lontar Pattodioloang II*. Perang bermula karena perselisihan batas wilayah, antara raja Mamuju dan raja Kaili. Raja yang pertama mengadu kepada raja Sendana dan Tapalang, kemudian diteruskan kepada Balanipa, Pamboang, dan Banggae. Setelah bermusyawarah, diputuskan untuk menyerang Kaili. Pasukan Mandar dipimpin raja Balanipa, Daeng Marrumpa Tomadio Disalassaqna. Selama berbulan-bulan perang, Kaili belum ditaklukkan. Pasukan Mandar mencoba bertahan di Lolomboju, sambil menyusun strategi dan waktu yang tepat untuk menyerang. Saat diserang, Kaili memutuskan untuk menyerah. Raja Kaili, Lamakkarau, bersama hadatnya menemui pimpinan pasukan Mandar di Lolomboju. Di sana kedua belah pihak bersepakat bahwa:

“Nama-nama/ nama/dondongduambo ngi anna’ soro’mo passe Mandaran anna’	“besok atau lusa kelompok Mandar sudah pulang kemudian ada yang
--	--

*diappole di kanang, di
kairi namanggesar
pura lowadi
Lolomboju, mau
Belanda ma'aluwa mau
Gowa, mau Bone
tanjengo odi passe
Mandaran anna' mua'
nareppo'i tanjemmu,
panganroi. Anna' mua'
i'dai natarima kanromu
siallani anna mupe
di Balanipa
mappeissang.*

*Ia topa mau napase
Mandaran mua' nana
gesari para'bue di
Lolomboju, Na
Sendana to'a, na
Mamuju to'a, na
Tappalang to'a, na
Banggae a, na benuang
to'a tanjeng to'o di
Balanipa. Ana' mua'
nareppo'i tanjemmu di
silam/ba no'e di
Balanipa. Anna' mua'
mokai silambang di
Balanipa da
mapendalingai.*

*Anna mua' naparosso'o
siallani anna' mupe'
ullei di Balanipa, anna'
ingganna Kaili
diwamabbundu'.
Sallessorani tau iranna.
Sallessoran tedong.
Sallessoran gimbal.
Sallessoran
beke'rabatena Pitu
Babba Binanga".*

datang dari kanan
atau kiri, untuk
mengubah
kesepakatan di
Lolomboju walau
Belanda yang
berkehendak walau
Gowa, walau Bone
katakan tunggu dulu
Mandar. Kalau
mereka menolak
minta maaf. Kalau
ditolak juga lawan
berperang lalu kirim
utusan ke Balanipa
untuk
melaporkannya.

Begitu pula
walaupun orang
Mandar, kalau
bermaksud merubah
keputusan di
Lolomboju. Apakah
ia Sendana, Mamuju,
Tappalang, Banggae,
ataukah Benuang
katakan, tunggu dulu
Balanipa. Kalau ia
tolak permintaanmu
ajak mereka ke
Balanipa. Kalau
mereka tak mau ke
Balanipa, jangan
perdulikan maunya.

Kalau mereka
memaksamu, lawan
dan kirim kurir ke
Balanipa lalu
bersama seluruh
Kaili melawannya.
Seribu manusia
utangnya. Seribu
ekor biri-biri. Seribu
ekor kambing.

Kajian Bustan Basir Marasmenemukan bahwa batas wilayah Mandar di utara sampai Tanah Mea, Lalombi. Daerah itu disebut Tanah Mea karena pernah menjadi tempat perang antara orang Mandar dan orang Kaili yang mengakibatkan pertumpahan darah. Karena itulah, menurut tradisi lisan penduduk lokal, tempat itu kemudian disebut Tanah Mea atau "tanah yang menjadi merah" (Maras 2009: 24). Daerah itu sekarang termasuk wilayah administratif Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah kesepakatan di Lolomboju, tidak terdengar konflik antara kedua pihak, Mandar dan Kaili. Baru awal abad ke-20, konflik batas wilayah terjadi lagi, antara raja Mamuju dan raja Banawa (Junarti 2011: 28). Menyikapi masalah tersebut, pemerintah Hindia Belanda menetapkan, dengan Surat Gubernur Sulawesi dan Daerah Bawahannya No. 308 tanggal 2 Mei 1904, batas wilayah kedua belah pihak di antara Suremana, Lalombi, dan Tanahmea (lihat peta 2).

Masalah perbatasan di atas dibicarakan lebih lanjut antara Asisten Residen Sulawesi Tengah dan Kontrolir Balanipa Mandar bulan November 1905. Kedua pihak sepakat "*dat de grens tusschen Paloe en Banawa eenerzijds en Mamoedjoe anderzijds gevormd wordt door de rivier Soeramana, van hare monding stroomopwaarts tot over een afstand van ongeveer tien palen*" (bahwa batas antara Palu dan Banawa di satu sisi serta Mamoedjoe di sisi lain dibentuk oleh Sungai Suramana, dari mulut ke hulu hingga jarak sekitar sepuluh *paal* [sama dengan 18.518,5 meter]). Batas tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi No.17, tanggal 16 April 1906. Dari batas itu ke Selat Makassar ditentukan kemudian (*Kolonial Verslag* 1906: 60).

Demikian ketentuan Balanipa (Syah 1992: 36-37).



Peta 2. Batas Wilayah (dalam lingkaran) Mamuju dengan Banawa 1904
Sumber: Alsec GBM-GS No.4190



Gambar 2. Muara Sungai Suremana, batas antara Mamuju dan Banawa
(Dok.Asmunandar, 2018)

Dalam sumber Sejarah Banawa disebutkan bahwa batas Kerajaan Banawa di pantai barat dengan Mamuju bagian utara ialah Sungai Suremana. Tanah Mea (Tanameya), pada masa kerajaan merupakan wilayah Mandar *Pitu Babana Binanga* (Maras 2009: 24), dalam sumber itu termasuk wilayah Banawa (BKI 1905: 514-515). Menurut laporan pejabat Sipil Belanda, Horweg (26 November 1909), wilayah Mamuju utara berbatasan dengan Banawa, sedangkan timur dengan Palu, Luwu, serta Binuang dan Balanipa. Batas Mamuju dengan Banawa dipertegas dengan Keputusan

Gubernur No.21, tanggal 10 Maret 1908, yakni sepuluh *palen* dari muara Sungai Suremana ke dalam (TNI 1911: 57-58).

Warisan Mandar

Sesungguhnya penyatuan antara tujuh kerajaan pesisir dan tujuh kerajaan pedalaman, pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, merupakan tonggak politik lahirnya Mandar, kemudian dijadikan dasar administratif *afdeling* Mandar dengan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 17, tanggal 5 Juli 1909, dibawah seorang Kontrolir Kepala di Majene. Daerah Mandar dibagi menjadi dua *onderafdeling*. Pertama, *Onderafdeling* Mandar dengan ibukota Majene, meliputi lanskap Binuang, Balanipa, Banggae, Pambauwang, dan Cenrana, dipimpin langsung oleh kepala afdeling. Kedua, *Onderafdeling* Mamuju, ibukota Mamuju, dipimpin seorang Penguasa Sipil Perwira. Wilayahnya meliputi lanskap Mamuju dan Tapalang (*Staatsblad* 1909 No.160; Vorstman 1924: 23-24).

Berdasarkan *Staatsblad* No.352 (1 Januari 1912), Afdeling Mandar memperoleh seorang Asisten Residen, J. Seijne Kok (1912-1915), sebagai kepala *afdeling*. Wilayah Mandar dibagi empat *onderafdeling* dengan ibukota masing-masing yaitu: Majene (Majene), Balanipa (Campalagian), Binuang (Polewali) dan Mamuju (Mamuju) (Regeringsalmanak 1916: 223-24). Empat tahun kemudian (1916), wilayah Mandar ditata menjadi empat:

1. *Onderafdeling* Majene (ibukota di Majene) mencakup lanskap Majene, Pambauwang, dan Sendana.
2. *Onderafdeling* Balanipa dan Dataran Rendah Binuang (ibukota di Polewali) terdiri atas lanskap Balanipa dan sebagian Binuang Atas.
3. *Onderafdeling* Mamuju (ibukota di Mamaju) mencakup lanskap Mamuju dan Tapalang.
4. *Onderafdeling* Pitu Ulunna Salu dan Binuang Atas (ibukota di Malabo) mencakup seluruh Pitu Ulunna Salu dan sebagian Toraja yang termasuk daerah Binuang Atas (*Staatsblad* 1916 No.352).

Pada tahun 1918, *onderafdeling* terakhir dimekarkan menjadi dua: Binuang Atas (ibukota Mamasa) dan Pitu Ulunna Salu (ibukota Mambi). Kedua *onderafdeling* tersebut kemudian disatukan lagi tahun 1925 dengan nama sebelumnya, Binuang Atas dan Pitu Ulunna Salu, ibukota Mamasa (Regering-salmanak 1925: 275). Tahun 1931, wilayah *Onderafdeling* Binuang Atas dan Pitu Ulunna Salu digabung dengan *Onderafdeling* Balanipa dan Dataran Rendah Binuang. Lima tahun kemudian (1936), kedua *onderafdeling* dipisah dan dikembalikan pada keadaan semula. Dengan Keputusan Gubernur Timur Besar 1940 No.21 (24 Februari) wilayah *Afdeling* Mandar dibagi menjadi empat, seperti pembagian tahun 1916 yaitu: Majene, Polewali, Mamuju, dan Mamasa.

Penataan tersebut tidak berubah pada zaman Jepang (1942-1945). Berdasarkan *Osamu Seirei* 1942 No.1, semua badan pemerintahan dan kekuasaan, hukum dan undang-undang dari pemerintahan sebelumnya (Hindia Belanda) tetap diakui sah sementara waktu, bila tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer, maka yang berubah hanya nomenklatur, dari *afdeling* menjadi *Ken* dan *onderafdeling* menjadi *bunken*. Apabila pada masa Hindia Belanda kepala *afdeling* dijabat seorang asisten residen, pada masa Jepang dipimpin seorang *Ken Kernriken*. Begitu pula *bunken* dipimpin seorang *Bunken Kanriken*. Empat *bunken* dalam *Ken* Mandar masing-masing berkedudukan di Majene, Polewali, Mamasa, dan Mamuju (Pemprop 1991: 212-222).

Satu hari setelah proklamasi (17 Agustus 1945), dibentuk delapan provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Wilayah Mandar termasuk dalam Propinsi Sulawesi dengan gubernur pertama dan terakhir ialah G.J. S.S. Ratulangi. Tidak sampai satu tahun, tepatnya 5 April 1946, Ratulangi ditangkap oleh Belanda dan disingkan ke Serui Papua (sampai 1948). Pada akhir tahun 1946 dibentuk Negara Indonesia Timur (NIT: 1946-1949) dengan ibukota Makassar. Status Mandar tetap seperti pada masa Hindia Belanda sebagai *afdeling*, dengan empat *onderafdeling*, ibukota Majene.

Mengacu keputusan Presiden Indonesia Timur (Tjokorde Gde Rake Soekawati) No.1, tanggal 18 Oktober 1948, dibentuk Pemerintahan Gabungan Selebes Selatan, terdiri atas 30 kerajaan dan delapan badan hadat. Pemerintahan itu dipimpin Andi Pabentengan Daeng Palawan (raja Bone) sebagai ketua dan Andi Idjo Karaeng Lalolang (raja Gowa) selaku ketua muda (Arsip Tana Toraja No.1705. Tujuh kerajaan-kerajaan di Mandar yang termasuk gabungan itu dan wakilnya yaitu: Rammang Patta Lolo (Majene), Andi Basse (Balanipa), Pawelai (Cenrana), Toralipu (Pambauwang), La Maga (Binuang), Abdul Hafid (Tapalang), dan Djalalu Amara Indar (Mamuju) (Pemprop 1991: 291-292).

Setelah berakhirnya NIT, wilayah Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS: 1949-1950). Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Keputusan Gubernur Sulawesi No.618 tahun 1951, kata "*afdeling*" diubah menjadi "*daerah*". Cakupan Daerah Mandar tetap seperti pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Undang-undang No. 29 tahun 1959, Daerah Mandar dibubarkan dan menjadi tiga Daerah Tingkat II dalam: Majene, Mamuju, dan Polewali Mamasa (Polmas). Daerah yang disebut terakhir merupakan gabungan dua *onderafdeling* dari zaman Hindia Belanda (*Onderafdeling* Balanipa dan Dataran Rendah Binuang dan *Onderafdeling* Binuang Atas dan Pitu Ulunna Salu), berkedudukan di Polewali (Pemprop 1991: 359-360, 408-409).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 tahun 1960, Propinsi Administratif Sulawesi Selatan terdiri atas 27 daerah tingkat II. Tiga di antaranya adalah bekas Daerah Mandar. *Pertama*, Daerah Tingkat Majene terdiri atas empat kecamatan: Majene, Pamboang, Cenrana, dan Malunda. *Kedua*, Daerah Tingkat II Polewali Mamasa mencakup delapan kecamatan: Polewali, Wonomulyo, Campalagian, Balanipa, Mamasa, Tanglangan, Mambi, dan Sumarorong. *Terakhir*, Daerah Tingkat II Mamuju meliputi enam kecamatan: Mamuju, Tappalang, Kaluku, Budong-budong, Pasangkayu, dan Kalumpang (Pemprop 1991: 437-467).

Status tiga Daerah Tingkat II tersebut berakhir pada tahun 2004, ketika terbentuk Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang ke-33 di Indonesia (UU No.26 tahun 2004). Sejak tahun itu, seluruh wilayah Mandar menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Selain fakta sejarah, ada dua fakta yang menyiratkan kuatnya faktor Mandar: *pertama*, inisiasi perjuangan pembentukan provinsi datang dari Forum Silaturahmi dan Partisipasi Masyarakat Mandar (Forum Sipamandar) yang dibentuk tahun 1994; *kedua*, seperti dikemukakan Darmawan Mas'ud Rahman (Wakil Ketua Dewan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat), tusukan nilai budaya ke-mandar-an (Mandar bukan bermakna etnis) untuk tetap bersatu atau *sipamandaq* (Idham dan Sapriillah 2010: vii-ix, xiv, 176-182).

PENUTUP

Latar pembentukan konfederasi Mandar terkait kebutuhan internal dan faktor eksternal. Penyatuan antara daerah pedalaman dan pesisir sangat penting untuk menopang perkembangan perdagangan maritim yang digiatkan oleh Kerajaan Balanipa pada masa Tomepayung (1580-1610). Mandar Pesisir harus menjaga eksistensidari ekspansi kekuatan eksternal (Gowa, Bone, dan Ajattapareng). Perluasan wilayah ke selatan dan utara memiliki karakter masing-masing. Perluasan ke selatan lebih awal, terkait campur tangan Kerajaan Gowa, baik ketika menjadikan Binuang sebagai anggota konfederasi Mandar Pesisir, maupun saat konflik perbatasan antara Binuang dengan Sawitto. Karena itu, dinamika batas ini terkait Perang Makassar, dimana Mandar menjadi sekutu setia Gowa. Akibat perang itu, wilayah Mandar menyempit (dari Binanga Karaeng) sampai Sungai Paku. Perluasan ke utara dilakukan oleh Mandar Pesisir sendiri dengan menaklukkan Kerajaan Kaili. Pada masa Hindia Belanda, batas Mandar menyempit (dari Lolombuju) ke selatan, dengan menjadikan Sungai Suremana sebagai batasnya. Kedua sungai tersebut (Paku dan Suremana) menjadi batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dapat dikatakan bahwa provinsi itu merupakan nama baru Mandar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan batas wilayah dipengaruhi faktor sejarah. Karena itu, diperlukan kajian sejarah tentang batas-batas wilayah (kabupaten dan provinsi) di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pada konteks tersebut, sejarah bukan rangkaian kisah masa lalu yang terpisah dari masa sekarang, melainkan fondasi untuk memahami masa kini dan menata masa depan. Artikel ini diharapkan sedikit memenuhi kebutuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Lokal

- Lontara Pattappingang* (transkripsi dan terjemahan Suradi Yasil *et al*; Depdikbud, 1985).
- Lontarak Pattodioloang di Mandar I & II* (transkripsi dan terjemahan M.T. Azis Syah, 1992, 1993).
- Lontar Mandar* (transkripsi dan terjemahan Disporabudpar Kabupaten Majene, 2010).

Sumber Kolonial

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta; *Algemeen Secterarie GBM-GS* No. 3188, 4190.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan(DPK) Sulawesi Selatan; *Arsip Tana Toraja* No. 1705.
- “Het Landschap Donggala of Banawa”, *BKI* Deel LVIII. ‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1905, hlm.514-531.
- Ikhtisah Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848.Jakarta: ANRI, 1973
- Kolonial Verslag van 1906.
- Kolonial Verslag van 1907
- Memorie van den Gouverneur van Selebes en Onderhorigheden, F.R. Forstman, 28 April 1924.
- Memori Asisten Residen W.J. Leyds selama bertugas di Mandar (Hanoeh Luhukay dan B.E. Tuwanakotta; penerjemah). Makassar: Yayasan Kaituppa, 2006.
- “Nota Bevatende Eenige Gegevens Betreffende het Landschap

- Mamoedjoe” (Horweg, 20 November 1909), *TNI Deel LIII*. Batavia: Albrecht & Co – ‘S Hage: M. Nijhoff, 1911, hlm. 57-154.
- Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1916
- Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1925
- Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1931
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1909 No.360
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1911 No.506
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1912 No. 3
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1916 No. 352
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1917 No. 249
- Buku, Tesis, dan Disertasi**
- Amir, M. & Sahajuddin. 2011. *Konfederasi Mandar: Kajian Sejarah Persekutuan Antar Kerajaan di Sulawesi Barat*. Makassar: Dian Istana.
- Andaya, Leonard Y. 2004 *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17*. Makassar: Ininnawa.
- Ankersmit, F.R. 1987. *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. (Dick Hartoko; penerjemah). Jakarta: Gramedia.
- Druce, Stephen C. 2009. *The Lands of the Lakes: A history of the Ajattapareng kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE*. Leiden: KITLV Press.
- Idham dan Sapriillah. 2010. *Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Solo: Zada Haniva Publishing.
- Junarti, 2001. “Elite dan Konflik Politik di Kerajaan Banawa, Sulawesi Tengah 1888-1942”. (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Block, R. 1817. *History of the Island of Celebes*. Calcutta Gazette Press.
- Mandra, Abdul Muis (1987) *Beberapa Perjanjian dan Hukum Tradisi Mandar*. Majene: Yayasan Saq-adawang.
- Maras, Bustan Basir (2009) *Tapak-tapak Perjuangan Berdirinya Mamuju Utara*. Yogyakarta: Annora Media.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. 1983. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Pemprop (1991) *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemerintah Propinsi Darah Tingkat II Sulawesi Selatan.
- Poelinggomang, Edward L. 2012. *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya – De Lamacca.
- _____. 2016. *Makassar abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sjafruddin, Amier. 1989. “Perjanjian Antarkerajaan Menurut Lontarak: Mengungkap salah satu aspek dalam Sejarah Hukum Internasional Adat abad XV-XVIII di Sulawesi Selatan”. (Disertasi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Resink, G.J. 2012. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok: Komunitas Bambu.
- Zuhdi, Susanto. 2018. *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope – Labu Wana [Edisi Revisi]*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Wawancara**
- Budiati Bestari (Camat Binuang) di Polewali Mandar, 7 Juni 2018.
- Syarifuddin Letu (Kepala Desa Paku, Binuang) di Polewali Mandar, 7 Juni 2018.